

## Faktor Penyebab Komersialisasi Pendidikan

Alifiani Purwaningrum<sup>1</sup>, Muhammad Rifa'i Subhi<sup>2</sup>

<sup>12</sup> UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia; alifiani.purwaningrum22051@mhs.uingusdur.ac.id, muhamadrifaisubhi@uingusdur.ac.id

Received: 01/11/2023

Revised: 11/11/2023

Accepted: 22/11/2023

### Abstract

Commercializing education means turning education into a business or incorporating business elements into it. Of course, this often happens at various levels of education. Many schools collect fees outside of government regulations, or the government usually mentions extortion fees in schools, then the government blames the school, by linking the boss's funds. If in a formal education school, the school only relies on money from BOS funds, of course the school will experience passivity in carrying out learning activities. There are many new things related to supporting learning activities, which cannot be fulfilled, because they are hampered by the lack of BOS funds. It cannot be denied that formal education schools, which usually prioritize quality, are schools that usually have high fees, and only the well-off can afford the financing. In terms of formal education, of course there don't seem to be a few people who take advantage of this for business purposes, where the fees set are quite burdensome for parents of students, but again, schools always set rates according to the facilities provided, both from teachers and teachers. professional, complete learning support tools, comfortable buildings, and so on.

### Keywords

Commercialization, Education

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan isu yang sangat mendasar, karena erat kaitannya dengan perkembangan manusia (Fathoni, 2021). Oleh karena itu, selama manusia masih ada, pendidikan akan terus menjadi bagian penting dalam kehidupan. Karena alasan ini, pendidikan selalu menarik untuk diperbincangkan, terutama di kalangan para pemangku kepentingan pendidikan. Bahkan ketika muncul perdebatan tentang kualitas manusia, pendidikan sering menjadi fokusnya.

Perlu diperhatikan bahwa organisasi-organisasi yang bertanggung jawab atas masalah pendidikan semakin berkembang, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, bahkan organisasi global seperti PBB memiliki peran yang signifikan dalam memperhatikan



pendidikan. Salah satu divisinya, yaitu UNESCO, memiliki serangkaian kebijakan terkait pendidikan, termasuk "pendidikan untuk semua" dan "pendidikan sepanjang hayat."

Indonesia juga memiliki komitmen yang serupa dalam hal pendidikan. Ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945, yang menekankan pentingnya mendidik bangsa (Santoso et al., 2023). Pasal 31(ayat 1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 34 (ayat 1), menegaskan bahwa setiap warga negara berusia 6 tahun memiliki hak untuk mengikuti program wajib belajar, yang diwajibkan hingga usia 15 tahun dalam pendidikan dasar.

Kelahiran undang-undang ini memberikan dorongan positif kepada sektor pendidikan, karena memberikan hak yang setara kepada semua warga negara Indonesia untuk menerima pendidikan tanpa adanya diskriminasi, walaupun belum mencapai standar yang diharapkan. Standar tersebut mencakup hanya tingkat dasar (SD/MI dan SMP/MTS), sedangkan pemerintah belum menganggapnya sebagai suatu kewajiban saat mencapai tingkat SLTA dan pendidikan tinggi (PT).

Pendidikan bukan hanya berperan sebagai pembentuk karakter dan kepribadian, melainkan juga sebagai persiapan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan (Fatoni, 2019). Pengaruh pendidikan sangat signifikan dalam menghadapi dampak globalisasi yang telah merambah berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahkan dalam sektor pendidikan itu sendiri. Saat ini, pendidikan terjebak dalam arus komersialisasi, yang mengakibatkan biaya pendidikan yang tinggi.

Dampaknya adalah bahwa banyak anak dari latar belakang ekonomi rendah mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Sekolah-sekolah sekarang mengadopsi aturan-aturan yang mirip dengan pasar, yang mengakibatkan

terjadinya distorsi pada visi pendidikan. Keberhasilan pendidikan saat ini hanya diukur oleh jumlah besar lulusan yang dapat dipekerjakan oleh industri. Model pendidikan seperti ini tidak fokus pada pemberdayaan sosial siswa, padahal tujuan sejati pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi intelektual mereka (Andrias Harefa, 2005: 151).

Islam menghormati ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang harus terus dicari selama hidup manusia. Individu yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya Iman (keyakinan), Islam, Ihsan (kesempurnaan dalam ibadah), dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), tidak akan pernah merasa puas dengan pengetahuan yang dimilikinya. Mereka akan terus belajar dan menyelidiki tentang alam semesta (makrokosmos) dan diri mereka sendiri (mikrokosmos) dengan tujuan mencapai kesempurnaan manusia (Insan Kamil).

Pendidikan, dengan sifatnya yang tak pernah berakhir dalam prosesnya, memiliki berbagai tahapan yang dapat dijelajahi. Pendidikan hadir dalam berbagai bentuk dan perspektif. Menurut pandangan Paulo Freire, pendidikan adalah upaya untuk mengembalikan esensi manusia sehingga mereka dapat terhindar dari penindasan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan. Pada dasarnya, pendidikan bertujuan untuk membebaskan manusia dari berbagai tantangan dalam kehidupan.

Selain itu, pendidikan sering dilihat sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, membentuk karakter, mengasah pikiran, dan meningkatkan keterampilan kerja (Wahyuningsih, 2017). Di sisi lain, pandangan lain menganggap pendidikan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran agama, alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan status sosial, dan menciptakan keadilan sosial.

Banyak peneliti ataupun para ahli yang menjelaskan mengenai komersialisasi Pendidikan, dari penjabaran beberapa para peneliti atau para ahli, memiliki kesimpulan yang tidak jauh berbeda, ataupun bisa dikatakan hamper sama. Berikut ini adalah pengertian Komersialisasi menurut para ahli.

Menurut Friedman dan Van Hayek (seperti yang dikutip dalam Rumapea, 2017), komersialisasi pendidikan mencerminkan kondisi di mana pendidikan dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat industri dan preferensi pasar (masyarakat berorientasi pasar) (Agustinova, 2020). Selain itu, Sulfasyah dan Arifin (2016) juga menyatakan bahwa komersialisasi pendidikan telah mengubah peran pendidikan menjadi alat untuk memproduksi tenaga kerja bagi sektor industri, bukan sebagai proses peningkatan pengetahuan dan pematangan masyarakat. Praktik komersialisasi pendidikan saat ini menggambarkan bahwa pendidikan lebih serupa dengan lembaga produksi mesin yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pasar industri dan diukur dari segi ekonomi (Sulfasyah & Arifin, 2016).

Istilah "komersialisasi pendidikan," menurut Wibowo memiliki dua makna yang berbeda, yaitu: Komersialisasi pendidikan yang merujuk pada lembaga pendidikan dengan program dan fasilitas mahal. Dalam konteks ini, pendidikan hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang ekonominya kuat. Lembaga-lembaga semacam itu sebenarnya tidak menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan. Komersialisasi pendidikan jenis ini sebenarnya tidak mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, tetapi perlu diperhatikan karena dapat menghasilkan diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional (Fellang, 2022).

## **2. METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada paradigma kualitatif, sehingga secara historis, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu tidak melibatkan analisis data kuantitatif. Dari segi objek penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah, yang melibatkan analisis dokumen secara terstruktur. Penelitian ini berfokus pada studi tentang pemikiran karakter, yang didasarkan pada karya tulis yang dihasilkan oleh karakter itu, seperti buku dan sumber informasi lainnya.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, sehingga teknik dokumentasi menjadi pendekatan yang relevan. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan teknik analisis isi. Analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memeriksa secara mendalam isi informasi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dampak dari globalisasi dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, dapat diibaratkan sebagai pisau yang memiliki dua sisi; jika digunakan dengan bijak, akan membawa kemudahan, tetapi jika digunakan dengan kurang hati-hati, bisa menjadi hal yang rumit. Globalisasi telah memengaruhi berbagai bidang, termasuk pendidikan. Di Indonesia, perubahan dalam sistem pendidikan sejak globalisasi menjadi lebih nyata dan signifikan. Globalisasi telah memengaruhi sistem pendidikan dengan cara seperti komersialisasi pendidikan. Di sisi lain, ada beberapa dampak negatif globalisasi dalam pendidikan, seperti pengelompokan status sosial, penurunan kendali negara dalam urusan pendidikan, penurunan moral siswa, penurunan keberagaman budaya lokal, dan munculnya budaya yang lebih berorientasi pada kecepatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat definisi bahwa pendidikan adalah upaya untuk mencapai kebebasan. Namun, Liberalisasi Pendidikan adalah suatu sistem yang sengaja dirancang oleh pihak-pihak yang memiliki modal dengan tujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin keuntungan dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut, tanpa mempertimbangkan apakah tujuan negara Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercapai atau tidak. Akibat dari liberalisasi pendidikan adalah munculnya komersialisasi dalam sektor pendidikan.

Liberalisasi pendidikan merupakan salah satu aliran atau pandangan dalam dunia pendidikan saat ini yang mulai menjadi pandangan umum dalam memahami

makna pendidikan, baik dalam pemahaman filosofis maupun makna normatifnya (Afrizal, 2018). Salah satu ciri utama pendidikan dengan pandangan liberal adalah upayanya untuk selalu mengikuti kondisi ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan. Ini tampak dalam berbagai kebijakan Kementerian Pendidikan beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, kompetensi yang diharapkan dari peserta didik diarahkan untuk memenuhi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia kerja, seperti yang sering diubah dengan setiap pergantian kurikulum kita (Fakih, 2002).

### **Komersialisasi Pendidikan**

Perkembangan kapitalisme dalam sektor pendidikan di sekolah adalah hasil dari era globalisasi dan juga kesalahan dalam paradigma dan pendekatan pendidikan. Kesalahan ini berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda dan telah berlanjut tanpa kesadaran selama masa pemerintahan Orde Baru hingga saat ini. Kesalahan paradigma tersebut terletak pada penerapan paradigma "kompetisi" dalam pendidikan, sedangkan seharusnya paradigma "keadilan sosial" yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat seharusnya diutamakan.

Pada pandangan awal, paradigma kompetisi mungkin terlihat wajar, tetapi jika ditelaah lebih dalam, paradigma ini sebenarnya digunakan untuk mempertahankan ketidaksetaraan ekonomi-sosial yang signifikan. Sebagai contoh, ada perbedaan dalam alokasi subsidi yang cenderung mendukung sekolah negeri unggulan di ibu kota, sementara sekolah negeri di daerah terpencil kurang mendapatkan perhatian.

Selain itu, terdapat perbedaan perlakuan antara sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah dan sekolah swasta. Sekolah negeri sering kali mendapatkan perlakuan lebih baik, sementara sekolah swasta dianggap sebagai "anak tiri". Perbedaan ini tidak semata-mata karena faktor kualitas, tetapi seringkali dipandang sebagai bagian dari agenda politik dan ekonomi tertentu.

Paradigma "kompetisi" lebih mendorong pendekatan kapitalis liberal, dengan tambahan aspek "feodal," dan pandangan "sumber daya manusia." Pendekatan "sumber daya manusia" memperlakukan manusia seperti aset atau komoditas, di

mana nilai manusia diukur dari segi ekonomis. Pendekatan ini lebih terkait dengan gagasan pertumbuhan ekonomi dalam pandangan ekonomi klasik.

Akibat dari kesalahan dalam paradigma dan pendekatan, yang menghasilkan perbedaan perlakuan pemerintah dalam alokasi subsidi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, adalah bahwa sekolah-sekolah swasta mengalami keterbatasan dana dalam menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki fasilitas sekolah guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan untuk menggaji guru-guru, sekolah swasta harus mengenakan biaya SPP yang lebih tinggi daripada sekolah negeri. Selain itu, mereka juga mengenakan biaya tambahan kepada orang tua siswa, seperti biaya ujian, uang rapor, uang ijazah, perayaan hari besar, uang UKS, OSIS, dan lain sebagainya.

Dampak dari beban ekonomi sosial yang berat ini adalah ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, baik bagi guru/dosen di satu sisi maupun bagi peserta didik dan keluarga mereka di sisi lain. Hal ini berdampak negatif terhadap tingkat kelulusan, dengan sebagian besar peserta didik tidak berhasil menyelesaikan pendidikan mereka, terlihat dari sekitar sepertiga dari jumlah pendaftar yang akhirnya drop-out atau tidak menyelesaikan pendidikan mereka tepat waktu. Dengan kata lain, putus sekolah sebelum waktunya menjadi hasil dari beban yang berat dan ketidaksetaraan ekonomi sosial yang ada. parafrasesehingga semakin banyak anak didik yang tidak mendapatkan hak-hak mereka dalam dunia pendidikan.

### **Faktor Penyebab Kapitalisme dan Komersialisasi Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu kegiatan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Dalam pelaksanaannya, pendidikan melibatkan berbagai komponen yang berpartisipasi dalam proses tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi serta saling tergantung satu sama lain.

Adanya beragam komponen ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang kompleks, dan kompleksitas ini memengaruhi proses dan hasil

pendidikan. Oleh karena itu, hasil pendidikan tidak hanya ditentukan oleh komponen-komponennya saja, tetapi juga oleh prosesnya yang didukung oleh fasilitas dan sarana yang memadai. Dengan kata lain, pendidikan memerlukan pendanaan, terutama dalam konteks pendidikan berkualitas. Namun, penting untuk diingat bahwa pendanaan yang besar tidak selalu menjamin kualitas pendidikan, karena anggaran yang besar pun bisa dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

#### a. Pembiayaan Pendidikan

Secara umum, para pakar pendidikan biasanya menerjemahkan istilah "pendidikan" ke dalam bahasa Arab sebagai "al-tarbiyah." Istilah ini berasal dari kata "rabba," yang memiliki makna yang serupa dengan kata "nama, yanmu," yang menggambarkan ide peningkatan atau pertumbuhan. Pendidikan dapat dijelaskan sebagai usaha yang disengaja dan terencana yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik dalam hal potensi fisik maupun potensi spiritual mereka, dengan tujuan mencapai perkembangan yang optimal. Hal ini bertujuan mencapai "self realization," yakni kemampuan manusia untuk menjalankan peran mereka sebagai wakil Allah di bumi dengan tujuan menciptakan kesejahteraan di seluruh alam semesta.

#### b. Komersialisasi Dalam Pendidikan

Istilah "komersialisasi" berasal dari "komersial," yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan, yang melibatkan barang atau layanan yang dijual atau memiliki nilai niaga tinggi, terkadang dengan pengorbanan nilai-nilai lain seperti nilai sosial dan budaya. Komersialisasi merujuk pada tindakan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.

Istilah komersialisasi sangat dikenal dalam bidang ekonomi dan relevan dalam konteks sumber daya alam, sumber daya hayati, dan sumber daya nabati yang dapat diperdagangkan. Namun, komersialisasi tidak sesuai jika diterapkan dalam konteks pendidikan karena pendidikan berkaitan dengan pengembangan



potensi manusia yang pada dasarnya berperan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, komersialisasi pendidikan dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji, karena dapat mengorbankan nilai-nilai etika, budaya, dan agama. Akibat dari komersialisasi pendidikan bisa berujung pada pertukaran antara yang baik dan yang buruk, serta antara yang benar dan yang salah.<sup>1</sup>

Berikut beberapa aspek yang memunculkan komersialisasi pendidikan (Hamka, 2015), yaitu:

a. Aspek Politik

Pendidikan, sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh semua individu, memiliki dimensi politik yang terkait dengan pengelolaannya sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negara. Ideologi pendidikan di Indonesia adalah ideologi demokrasi Pancasila, yang menekankan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang sama. Dalam proses mendapatkan pendidikan, prinsip ini tercermin dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 45, yang menyatakan tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.

b. Aspek Budaya

Masyarakat Indonesia sangat menghormati gelar akademis, dan sebagai contoh, hampir setiap keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menyelesaikan pendidikan tinggi, selalu menampilkan foto wisuda mereka di dinding rumah. Hal ini mencerminkan bahwa di Indonesia masih ada budaya yang sangat menghargai gelar akademis. Kultur ini menjadi lebih kuat di kalangan lembaga pemerintah yang sering kali mempromosikan atau mengangkat pegawai yang memiliki gelar sarjana tanpa memeriksa atau menguji terlebih dahulu kemampuan akademik mereka. Secara ironis, program pendidikan semacam ini banyak diminati oleh pejabat-pejabat (Hamka, 2015).

c. Aspek Ekonomi

Tentu saja, aspek ekonomi adalah hal yang harus dibahas ketika kita berbicara

---

<sup>1</sup> Rustiawan, Hafid. "KOMERSIALISASI PENDIDIKAN: Analisis Pembiayaan Pendidikan." *Tazkiya* 16.01 (2015). Hlm. 48-54

tentang biaya pendidikan. Biaya pendidikan nasional pada dasarnya harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab XIV, Pasal 50, Ayat 6, dinyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan biaya pendidikan mereka sendiri. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah menghadapi kendala dalam membiayai pendidikan nasional, terutama pendidikan tinggi, yang sebelumnya mendapatkan subsidi sebanyak 75% dari pemerintah dan 25% sisanya dibiayai oleh masyarakat, termasuk dana SPP (Hamka, 2015).

d. Aspek Sosial

Pendidikan memiliki dampak signifikan pada perubahan strata sosial individu, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, strata sosialnya cenderung meningkat, dan sebaliknya (Burga & Damopolii, 2021). Pendapat ini sejalan dengan pandangan Kartono (1997) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi dan tingkat kebudayaan masyarakat yang tinggi akan menjadi indikator pertumbuhan bangsa dan negara terkait. Meskipun demikian, Bagaimana seseorang dapat mencapai pendidikan tinggi jika biaya pendidikan tinggi tersebut tinggi dan hanya terjangkau oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi yang baik. Pertanyaannya adalah bagaimana situasi bagi masyarakat yang berada dalam kelompok ekonomi yang kurang mampu (Hamka, 2015).

e. Aspek Teknologi

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, sekolah-sekolah dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung proses belajar-mengajar (Fellang, Arismunandar, & Bunyamin, 2021). Namun, terkadang lembaga pendidikan menggunakan perkembangan teknologi sebagai alasan untuk menjalankan komersialisasi pendidikan. Dampaknya adalah biaya masuk atau SPP di sekolah dan perguruan tinggi menjadi semakin tinggi, sehingga peserta didik dari lapisan ekonomi menengah ke bawah tidak mampu membayar biaya tersebut. Akibatnya, mereka tertinggal dalam mengakses teknologi, padahal teknologi

memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan, dan perkembangan negara (Burga & Damopolii, 2021).

### **Dampak Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan**

Dari perspektif teoritis, perlu diperhatikan bahwa liberalisasi dan komersialisasi pendidikan di Indonesia telah memberikan berbagai konsekuensi, baik yang menguntungkan maupun merugikan dalam proses pendidikan. Beberapa manfaat dari komersialisasi pendidikan meliputi:

- a. Pengurangan beban pemerintah dalam pendanaan pendidikan menyebabkan anggaran yang ada dapat dialokasikan ke keperluan lain yang lebih mendesak.
- b. Ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan bangsa.
- c. Komersialisasi pendidikan mendorong lembaga pendidikan untuk menjadi lebih kompetitif, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan.
- d. Peningkatan gaji para pendidik, baik guru maupun dosen, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, yang diharapkan akan mendorong kepuasan kerja dan kinerja mereka dalam membimbing siswa.

### **4. KESIMPULAN**

Perkembangan kapitalisme dalam sektor pendidikan di sekolah adalah hasil dari era globalisasi dan juga kesalahan dalam paradigma dan pendekatan pendidikan. Kesalahan ini berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda dan telah berlanjut tanpa kesadaran selama masa pemerintahan Orde Baru hingga saat ini. Kesalahan paradigma tersebut terletak pada penerapan paradigma "kompetisi" dalam pendidikan, sedangkan seharusnya paradigma "keadilan sosial" yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat seharusnya diutamakan. Banyak beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya Komersialisasi Pendidikan, yaitu factor politik, factor Budaya, Faktor Ekonomi, Faktor sosial dan factor Teknologi. Secara teoritis,

liberalisasi dan komersialisasi pendidikan yang terjadi telah memberi pengaruh atau dampak terhadap proses pendidikan di Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Beberapa kebaikan dari adanya komersialisasi pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Beban pemerintah dalam membiayai pendidikan semakin berkurang sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membiayai aspek lain yang lebih mendesak. 2. Memberi peluang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa 3. Lembaga pendidikan menjadi semakin kompetitif sehingga terjadi peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan. 4. Gaji para pendidik (guru maupun dosen) dapat lebih ditingkatkan. Kesejahteraan yang lebih baik diharapkan dapat memacu kepuasan kerja dan kinerja mereka dalam mencerahkan anak didik.

#### REFERENCES

- Agustinova, D. E. (2020). Urgensi Humanisme dalam Pendidikan Abad ke-21. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 173–188.
- Fathoni, T. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan Agama Islam Orang Tua Terhadap Karakter Religius Peserta Didik. *MENTARI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1).
- Fatoni, T. (2019). Pendidikan Karakter Berbasis Local Wisdom (studi kasus di TK Islam PAS Munqidzatun Nasyi'ah Desa Wilangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo). *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 14(01), 49–62.
- Fellang, I. (2022). Liberalisasi Dan Komersialisasi Pendidikan. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 13–26.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 297–311.
- Sulfasyah, S., & Arifin, J. (2016). Komersialisasi pendidikan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(2).
- Wahyuningsih, S. (2017). Lagu Anak Sebagai Media Dalam Mendidik Karakter Anak Usia Dini. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(1), 150.